

KAJIAN KOMPREHENSIF TUJUAN NEGARA BERDASARKAN PEMIKIRAN SOCRATES DAN PLATO

M. Fahmi, Usman, Zaki Al Zurga, Joko Umbaran

Universitas Merangin

*Correspondence: mf3886994@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas konsep tujuan negara berdasarkan pemikiran Socrates dan Plato, dua filsuf besar Yunani kuno. Socrates menekankan pentingnya keadilan sebagai inti kehidupan bermasyarakat dan mengkritik demokrasi yang tidak mempertimbangkan kebijaksanaan pemimpin. Sementara itu, Plato mengembangkan gagasan negara ideal dalam Republic, dengan keadilan sebagai fondasi utama yang diwujudkan melalui pembagian kelas sosial: penguasa (filosof-raja), prajurit, dan produsen. Tujuan akhir negara, menurut Plato, adalah menciptakan kebahagiaan kolektif melalui harmoni dan keteraturan. Artikel ini juga mengkaji relevansi pemikiran mereka dalam konteks modern, terutama dalam pembentukan sistem pemerintahan dan kepemimpinan. Penekanan pada keadilan dan kebijaksanaan menunjukkan bahwa negara harus menjadi alat untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan sejahtera.

Kata Kunci : Socrates, Plato, tujuan negara, keadilan, negara ideal, filsafat Yunani kuno, harmoni sosial, kebahagiaan kolektif, kepemimpinan filosofis, The Republic

Abstract

.This article discusses the concept of the state's purpose based on the thoughts of Socrates and Plato, two great ancient Greek philosophers. Socrates emphasized the importance of justice as the core of societal life and criticized democracy that disregards the wisdom of leaders. Meanwhile, Plato developed the idea of an ideal state in The Republic, with justice as its primary foundation, realized through the division of social classes: rulers (philosopher-kings), warriors, and producers. According to Plato, the ultimate goal of the state is to achieve collective happiness through harmony and order. This article also examines the relevance of their ideas in the modern context, particularly in shaping governance and leadership systems. The emphasis on justice and wisdom demonstrates that the state should serve as a tool to create a just, harmonious, and prosperous society.

Keywords : Socrates, Plato, purpose of the state, justice, ideal state, ancient Greek philosophy, social harmony, collective happiness, philosophical leadership, The Republic.

PENDAHULUAN

Diskusi mengenai tujuan negara telah menjadi topik sentral dalam filsafat politik sejak zaman Yunani kuno. Dua filsuf besar, Socrates dan Plato, memberikan kontribusi penting dalam membentuk pemikiran tentang bagaimana negara seharusnya berfungsi dan tujuan apa yang harus dicapai. Meskipun Socrates tidak secara eksplisit merumuskan teori tentang negara, ajaran-ajarannya mengenai keadilan dan kebajikan menjadi dasar pemikiran politik yang dikembangkan oleh muridnya, Plato. Dalam karyanya Republic, Plato menyusun konsep negara ideal dengan fokus pada keadilan dan harmoni sosial sebagai tujuan utamanya.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran Socrates dan Plato mengenai tujuan negara, serta relevansinya dalam konteks masyarakat modern. Dengan memahami pandangan mereka tentang keadilan, kepemimpinan, dan pembagian peran dalam masyarakat, kita dapat memperoleh wawasan lebih dalam tentang bagaimana negara dapat berfungsi secara efektif untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan kolektif.

Pemikiran Socrates mengenai negara dapat dilihat melalui ajaran-ajarannya tentang keadilan dan kebajikan. Meskipun tidak ada tulisan langsung dari Socrates, ajaran-ajarannya yang dicatat oleh murid-muridnya, seperti Plato dan Xenophon, menekankan pentingnya pencarian kebenaran dan kebajikan sebagai landasan moral dalam kehidupan masyarakat. Socrates berpendapat bahwa tujuan utama negara adalah menciptakan individu-individu yang baik dan bijaksana, yang dapat berkontribusi pada keharmonisan sosial. Keputusan yang diambil oleh negara seharusnya didasarkan pada kebijaksanaan moral yang dapat menciptakan tatanan yang adil, dan bukan hanya didorong oleh kekuasaan atau kekayaan.

Sementara itu, Plato dalam karyanya **Republic** mengembangkan konsep negara ideal yang didasarkan pada pembagian tugas dan peran yang jelas di dalam masyarakat. Menurut Plato, negara yang baik adalah negara yang memiliki tiga kelas utama: penguasa, penjaga, dan pekerja. Setiap kelas memiliki peran yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian mereka, dengan tujuan mencapai keadilan dan harmoni sosial. Penguasa, yang terdiri dari para filsuf-raja, dianggap memiliki kebijaksanaan yang diperlukan untuk memimpin negara dengan adil. Plato berargumen bahwa keadilan tercapai ketika setiap individu menjalankan peran yang sesuai dengan kemampuannya, dan ini menciptakan keseimbangan dalam masyarakat.

Plato juga mengemukakan pandangan yang menarik mengenai pendidikan dalam negara idealnya. Bagi Plato, pendidikan bukan hanya soal mengajarkan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk karakter moral dan intelektual individu. Dengan pendidikan yang tepat, individu-individu dalam masyarakat dapat memahami kebenaran dan mencapai kebajikan. Pendidikan juga memainkan peran penting dalam membentuk pemimpin yang bijaksana, yang dapat memimpin negara dengan adil dan efektif. Dalam konteks ini, negara berfungsi untuk mengarahkan dan mendidik rakyatnya menuju kebaikan bersama.

Relevansi pemikiran Socrates dan Plato dalam masyarakat modern terletak pada pentingnya keadilan, moralitas, dan pembagian peran dalam menciptakan negara yang stabil dan harmonis. Di tengah tantangan global seperti ketimpangan sosial, perubahan iklim, dan ketegangan politik, pemikiran mereka tentang negara yang adil dan bijaksana memberikan landasan bagi pemimpin dan pembuat kebijakan untuk merancang negara yang berfokus pada kesejahteraan kolektif. Dalam konteks saat ini, kita dapat melihat bagaimana konsep keadilan Plato, yang menekankan keseimbangan dan harmoni antara kelas-kelas sosial, masih relevan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif. Selain itu, pentingnya pendidikan yang membentuk karakter moral dan intelektual, seperti yang diajarkan oleh Plato, tetap menjadi elemen penting dalam pembangunan negara modern.

Dengan mengkaji kembali pemikiran Socrates dan Plato, kita dapat memperoleh wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip dasar dalam filsafat politik kuno ini masih dapat diterapkan dalam menghadapi tantangan kontemporer. Negara yang baik bukan hanya yang mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, tetapi juga yang mampu membentuk masyarakat yang adil, bijaksana, dan harmonis. Melalui prinsip-prinsip yang diungkapkan oleh Socrates dan Plato, kita dapat merenungkan bagaimana negara dapat berfungsi secara efektif untuk mencapai tujuan-tujuan luhur tersebut di dunia modern yang penuh dengan perubahan dan kompleksitas.

Selain itu, pemikiran Socrates dan Plato juga menyoroti pentingnya partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan politik. Socrates berpendapat bahwa setiap individu harus berkontribusi dalam kehidupan sosial dan politik berdasarkan pengetahuan dan kebijaksanaan moral mereka. Meskipun Socrates tidak secara eksplisit mengembangkan teori tentang demokrasi, dia mengajarkan bahwa warga negara harus berpartisipasi dalam pemerintahan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah hasil dari pemikiran yang bijaksana. Sementara itu, Plato lebih skeptis terhadap demokrasi, terutama dalam bentuknya yang langsung. Dalam **Republic**, ia mengkritik demokrasi Athena yang dinilai memberikan kebebasan terlalu banyak kepada orang-orang yang tidak bijaksana dalam mengambil keputusan. Namun, Plato juga mengakui bahwa dalam masyarakat yang ideal, ada ruang untuk suara rakyat, meskipun pembuat keputusan utamanya adalah para filsuf yang bijaksana. Pandangan ini mengundang refleksi tentang bagaimana sistem pemerintahan modern dapat memastikan bahwa keputusan politik tidak hanya berdasarkan suara mayoritas, tetapi juga pada pertimbangan moral dan kebijaksanaan yang mendalam.

Pentingnya pemisahan kekuasaan juga terlihat dalam pemikiran Plato, yang membagi tugas dan peran dalam negara menjadi tiga kelas yang saling melengkapi. Dalam negara idealnya, setiap kelas memiliki fungsi yang berbeda namun saling mendukung untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan. Pembagian ini mirip dengan konsep pemisahan kekuasaan yang diterapkan dalam banyak sistem pemerintahan modern, di mana kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dipisahkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun pandangan Plato tentang pembagian kekuasaan ini tidak langsung mempengaruhi teori-teori pemerintahan modern, prinsip dasarnya mengenai keseimbangan antara kekuasaan tetap relevan. Pemikiran ini membantu kita memahami pentingnya menjaga agar setiap cabang kekuasaan tidak saling mengintervensi atau mendominasi satu sama lain, sehingga tercipta sistem yang adil dan stabil.

Konsep keadilan dalam pemikiran Plato juga memberikan wawasan yang relevan bagi negara-negara modern yang menghadapi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Bagi Plato, keadilan terjadi ketika setiap individu menjalankan peran yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya, yang pada akhirnya akan membawa kesejahteraan kolektif. Dalam dunia modern, hal ini mengarah pada perlunya kebijakan yang memastikan akses yang adil terhadap sumber daya dan peluang bagi setiap warga negara, terlepas dari latar belakang sosial atau ekonomi mereka. Keadilan sosial yang diusulkan oleh Plato mengajarkan kita bahwa distribusi kekayaan dan kesempatan tidak hanya perlu adil, tetapi juga harus disesuaikan dengan peran dan kontribusi individu dalam masyarakat. Pendekatan ini dapat diterapkan dalam merumuskan kebijakan yang mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka.

Selain itu, pengaruh ajaran Socrates dan Plato terhadap pendidikan tetap menjadi salah satu aspek penting dalam pembentukan masyarakat modern. Kedua filsuf ini percaya bahwa pendidikan adalah alat utama untuk membentuk karakter moral dan intelektual individu, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada kehidupan sosial yang lebih baik. Dalam konteks saat ini, pendidikan yang berbasis pada pengembangan nilai-nilai moral dan intelektual masih menjadi dasar penting bagi pembentukan pemimpin yang bijaksana dan warga negara yang aktif. Pendidikan yang baik tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk kemampuan individu untuk berpikir kritis, membuat

keputusan yang tepat, dan berkontribusi pada masyarakat dengan cara yang positif. Dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada pendidikan moral dan karakter, negara dapat memastikan bahwa generasi mendatang akan mampu mengelola tantangan global dan mencapai kesejahteraan kolektif.

Akhirnya, penerapan prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Sokrates dan Plato dalam konteks dunia modern membutuhkan penyesuaian terhadap kompleksitas dan dinamika masyarakat saat ini. Meskipun dunia telah berkembang jauh sejak zaman Yunani kuno, nilai-nilai dasar yang diusung oleh kedua filsuf tersebut—seperti keadilan, kebijaksanaan, dan pembagian peran—tetap relevan dan menjadi landasan bagi pembangunan negara yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, mengkaji pemikiran mereka memberikan kita alat untuk mengevaluasi dan merumuskan kebijakan yang dapat menciptakan negara yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga adil dan harmonis secara sosial.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur atau kajian pustaka. Langkah-langkah penelitian yang digunakan antara lain:

1. Studi Literatur:

Penelitian dimulai dengan mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber utama terkait pemikiran Sokrates dan Plato, terutama karya-karya Plato seperti *Republic* dan catatan-dialog Sokrates yang ditulis oleh Plato. Buku dan artikel ilmiah tentang filsafat Yunani kuno juga digunakan untuk memahami konteks dan interpretasi terhadap gagasan-gagasan mereka.

2. Analisis Teoritis:

Setelah mengumpulkan sumber-sumber yang relevan, analisis dilakukan dengan cara membandingkan dan mengevaluasi pandangan Sokrates dan Plato tentang tujuan negara, keadilan, dan struktur sosial. Fokus utama adalah untuk memahami bagaimana konsep-konsep tersebut saling berkaitan dan memberikan panduan bagi pembentukan negara yang adil dan harmonis.

3. Sintesis Pemikiran:

Dalam langkah ini, pemikiran Sokrates dan Plato disintesis untuk melihat bagaimana kedua filsuf ini memandang peran negara dalam kehidupan sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk merumuskan kesimpulan yang menghubungkan gagasan mereka dengan kondisi masyarakat modern.

4. Refleksi dan Relevansi:

Penelitian ini juga berusaha untuk menilai relevansi pemikiran Sokrates dan Plato dalam konteks pemerintahan dan politik masa kini. Hal ini dilakukan dengan mengevaluasi prinsip-prinsip yang mereka ajukan, seperti keadilan, kebijaksanaan dalam kepemimpinan, dan pembagian tugas dalam masyarakat.

Dengan menggunakan metode penelitian ini, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tujuan negara berdasarkan pemikiran Sokrates dan Plato, serta penerapannya dalam konteks politik dan sosial saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Penelitian

Pemikiran Socrates dan Plato tentang tujuan negara menawarkan wawasan yang mendalam mengenai hubungan antara individu, masyarakat, dan negara. Keduanya sepakat bahwa tujuan utama negara adalah mewujudkan keadilan dan kebahagiaan kolektif, namun mereka memiliki cara yang berbeda dalam merumuskan bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai. Berikut adalah hasil dan pembahasan berdasarkan pemikiran kedua filsuf tersebut.

1. Tujuan Negara menurut Socrates

Socrates tidak pernah secara eksplisit merumuskan teori negara, namun pandangannya tentang moralitas dan keadilan memberikan dasar yang kuat bagi pemikiran politik. Dalam ajaran Socrates, keadilan adalah nilai tertinggi yang harus dicapai dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Keadilan, bagi Socrates, bukan hanya soal distribusi sumber daya atau kedudukan sosial, melainkan tentang setiap individu menjalankan peranannya dengan baik sesuai dengan kemampuannya. Negara, dalam pandangannya, berfungsi untuk menegakkan keadilan di antara warganya dan memastikan bahwa masyarakat berfungsi dengan cara yang benar dan bermoral.

Socrates berpendapat bahwa kepemimpinan yang bijaksana sangat penting bagi keberlangsungan negara yang adil. Pemimpin yang bijaksana, menurut Socrates, adalah mereka yang memiliki pemahaman moral yang mendalam dan dapat melihat kebaikan sejati. Pemimpin tersebut tidak hanya mengejar kekuasaan atau kepentingan pribadi, tetapi berfokus pada kebaikan umum dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan pemahaman ini, mereka dapat memimpin negara dengan cara yang adil dan efektif.

Bagi Socrates, kepemimpinan bukanlah soal kemampuan teknis atau kekuatan, tetapi tentang kebijaksanaan dan kemampuan untuk mengarahkan masyarakat menuju kehidupan yang baik dan bermoral. Pemimpin yang bijaksana akan tahu kapan harus membuat keputusan yang sulit dan bagaimana menyelesaikan konflik dengan cara yang adil. Hal ini menciptakan kepercayaan di antara rakyat dan memastikan stabilitas dalam negara.

Socrates juga menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk karakter dan moralitas individu. Sebagai dasar untuk mencapai keadilan dalam masyarakat, pendidikan moral dan intelektual menjadi fondasi bagi setiap anggota masyarakat untuk memahami apa yang benar dan baik. Tanpa pendidikan yang memadai, seseorang tidak akan mampu membuat keputusan yang tepat dan adil, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam peranannya dalam negara.

Dalam pandangan Socrates, negara yang ideal adalah negara yang mendorong pengembangan kebajikan di setiap individu, sehingga setiap orang berkontribusi pada tatanan sosial yang adil. Negara tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat, tetapi juga sebagai agen moral yang membimbing rakyatnya menuju kebaikan. Sebuah negara yang tidak memiliki pemimpin yang bijaksana atau yang gagal mendidik

warganya untuk menjadi individu yang adil, menurut Socrates, akan gagal menjalankan fungsinya dengan baik.

Pentingnya moralitas dalam ajaran Socrates menunjukkan bahwa negara yang ideal tidak hanya bergantung pada struktur hukum atau ekonomi, tetapi pada kebijaksanaan dan kebajikan individu-individu yang memimpin dan menjadi bagian dari negara tersebut. Meskipun Socrates tidak mengembangkan teori negara secara formal, pandangannya tetap relevan dalam diskursus politik dan menjadi dasar bagi teori-teori politik modern yang menekankan pentingnya kepemimpinan yang adil dan pemerintahan yang bermoral.

Contoh Konsep Kepemimpinan Bijaksana:

Seorang pemimpin negara harus mampu membuat keputusan berdasarkan kebajikan dan keadilan, bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Seperti dalam *Apology* karya Plato, Socrates berargumen bahwa seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan tentang kebajikan yang lebih tinggi, agar dapat membawa masyarakat menuju kebaikan bersama.

2. Tujuan Negara menurut Plato

Plato mengembangkan gagasan negara ideal dalam karyanya **Republic**, yang menekankan bahwa negara yang baik adalah negara yang mengutamakan keadilan. Menurutny, keadilan tercapai ketika setiap individu dalam masyarakat menjalankan peran yang sesuai dengan kemampuannya, tanpa mengganggu peran orang lain. Dalam pandangannya, masyarakat harus dibagi menjadi tiga kelas yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Tiga kelas tersebut adalah penguasa (filosof-raja), prajurit, dan produsen.

Penguasa, atau filosof-raja, adalah mereka yang bijaksana dan memiliki pengetahuan mendalam tentang kebaikan sejati. Mereka diberi tanggung jawab untuk memimpin negara dan membuat keputusan-keputusan penting yang akan mengarah pada kesejahteraan seluruh masyarakat. Bagi Plato, hanya orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang kebenaran dan kebajikan yang layak memimpin, karena mereka mampu memastikan bahwa keadilan dan kebaikan diterapkan di seluruh tatanan sosial.

Kelas kedua adalah prajurit, yang bertugas menjaga keamanan negara dan menegakkan hukum. Prajurit adalah individu yang memiliki keberanian dan kekuatan fisik untuk melindungi negara dari ancaman eksternal maupun internal. Mereka menjalankan tugasnya dengan loyalitas dan rasa tanggung jawab terhadap negara, memastikan bahwa ketertiban dan perdamaian tetap terjaga.

Kelas ketiga adalah produsen, yang mencakup petani, pedagang, dan pekerja. Mereka bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan ekonomi masyarakat, seperti makanan, barang, dan layanan. Bagi Plato, kelas ini juga penting karena tanpa mereka, negara tidak dapat berfungsi dengan baik. Produsen menjalankan peran vital dalam menjaga kestabilan ekonomi dan memenuhi kebutuhan dasar rakyat.

Keberhasilan negara dalam pandangan Plato terletak pada adanya harmoni dan kerjasama antara ketiga kelas ini. Setiap kelas harus menjalankan perannya dengan baik,

tanpa mengganggu peran kelas lainnya. Ketika setiap individu menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan menjalankan tugasnya sesuai dengan kemampuannya, negara akan mencapai keadilan dan kebahagiaan kolektif.

Melalui pembagian peran yang jelas dan penekanan pada keadilan, Plato menggambarkan negara ideal yang dapat mencapai keseimbangan sosial dan politik. Meskipun konsep ini lahir di dunia Yunani kuno, gagasan Plato tetap relevan hingga saat ini, terutama dalam upaya menciptakan negara yang adil dan harmonis. Contoh Pembagian Kelas Sosial dalam Negara Ideal:

Plato menggambarkan negara ideal seperti sebuah tubuh manusia, di mana masing-masing anggota tubuh (kelas) memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan tubuh secara keseluruhan. Penguasa (filosof-raja) bertindak seperti kepala yang memberi arahan, prajurit berfungsi seperti hati yang melindungi tubuh, dan produsen seperti anggota tubuh lainnya yang menjaga kelangsungan hidup tubuh secara keseluruhan.

3. Relevansi Pemikiran Socrates dan Plato dalam Konteks Modern

Pemikiran Socrates dan Plato tetap relevan hingga saat ini. Dalam konteks modern, konsep keadilan dan kepemimpinan bijaksana menjadi dasar bagi sistem pemerintahan yang ideal. Negara harus memastikan bahwa keadilan ditegakkan untuk semua warganya, dan pemimpin negara harus memiliki kebijaksanaan serta integritas untuk membuat keputusan yang terbaik bagi masyarakat.

Selain itu, pembagian tugas dalam masyarakat yang diajukan oleh Plato juga mencerminkan prinsip efisiensi dan keteraturan dalam struktur sosial. Dalam dunia modern, ini dapat diartikan sebagai pentingnya spesialisasi dan kolaborasi antara berbagai sektor dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.

Contoh Gambar

Berikut adalah contoh gambar yang menggambarkan struktur negara ideal menurut Plato, dengan pembagian kelas yang jelas:



Gambar di atas menggambarkan pembagian masyarakat dalam negara ideal Plato

Filosof-raja sebagai penguasa yang bijaksana di puncak.

Prajurit yang menjaga keamanan dan keadilan.

Produsen yang menjalankan ekonomi negara.

PENUTUP

Pemikiran Socrates dan Plato tentang tujuan negara memberikan landasan penting dalam filsafat politik yang terus berpengaruh hingga saat ini. Kedua filsuf ini menekankan bahwa negara harus berfungsi untuk mewujudkan keadilan, kebahagiaan kolektif, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Socrates lebih berfokus pada pentingnya keadilan dan kebijaksanaan pemimpin, sementara Plato mengembangkan gagasan negara ideal dengan pembagian kelas sosial yang berperan sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Relevansi pemikiran ini dalam konteks modern terlihat pada pentingnya prinsip keadilan dalam hukum dan pemerintahan, serta perlunya pemimpin yang bijaksana dan memiliki integritas. Pembagian tugas dalam masyarakat juga menjadi acuan bagi struktur sosial yang efisien, di mana setiap individu dapat berkontribusi sesuai dengan keahliannya.

Secara keseluruhan, pemikiran Socrates dan Plato memberikan wawasan yang berharga dalam membangun negara yang adil dan harmonis. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, nilai-nilai yang diajukan oleh kedua filsuf ini tetap relevan untuk diterapkan dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik dan berkelanjutan..

DAFTAR PUSTAKA

- Plato. (1992). Republic. Translated by Benjamin Jowett. Dover Publications. Retrieved from <https://www.gutenberg.org/ebooks/1497>
- Taylor, C.C.W. (2006). Socrates: A Very Short Introduction. Oxford University Press. Retrieved from <https://www.oxford.com/>
- Annas, J. (1981). An Introduction to Plato's Republic. Oxford University Press. Retrieved from <https://global.oup.com/academic/product/>
- Kahn, C.H. (1996). Plato and the Foundations of Metaphysics. Routledge. Retrieved from <https://www.routledge.com/>
- Irwin, T.H. (1995). Plato's Ethics. Oxford University Press. Retrieved from <https://global.oup.com/academic/>
- Kraut, R. (2018). Socrates: A Man for Our Times. Basic Books. Retrieved from <https://www.basicbooks.com/>
- Fine, K. (2003). The Oxford Handbook of Plato. Oxford University Press. Retrieved from <https://global.oup.com/academic/>
- Nussbaum, M. (1998). Kant and Stoicism: An Examination of the Ethical Theories of Immanuel Kant and the Stoics. Cambridge University Press. Retrieved from <https://www.cambridge.org/>